



Katalog : 7203007.73

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018/2019



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018/2019



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018/2019

ISBN : 978-623-7581-52-9

Nomor Publikasi : 73540.2006

Katalog BPS : 7203007.73

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 46 Halaman

Naskah :

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting :

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Kover oleh :

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Ilustrasi :

freepik.com

Penerbit :

BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Pencetak :

BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018/2019 merupakan hasil pengolahan dari Survei Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (K2) yang dikumpulkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari terbitan sebelumnya yang menyajikan data realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2018 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun 2019.

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, September 2020

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala,**



YOS RUSDIANSYAH

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. SUMBER DATA.....	1
III. KONSEP DAN DEFINISI.....	2
IV. ULASAN SINGKAT.....	11
Lampiran	17

Daftar Tabel

Tabel A	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016-2019	11
Tabel B	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2017-2019	12
Tabel C	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2017-2019	13
Tabel D	Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2017-2019	14
Tabel E	Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2017-2019	15

Daftar Lampiran

Tabel	Hal
1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	17
1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	18
1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	19
1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	20
1.5 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	21
1.6 Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	22
1.7 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	23
1.8 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	24
1.9 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019	25
1.10 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	26
1.11 Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	27
1.12 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	28
1.13 Realisasi Penerimaan Lain-Lain yang Sah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	29
1.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	30
2.1 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	31
2.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	32
2.3 Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	33

Tabel	Hal
2.4 Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	34
2.5 Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	35
2.6 Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	36
2.7 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	37
2.8 Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	38
2.9 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	39
2.10 Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	40
2.11 Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	41
2.12 Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	42
2.13 Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	43
2.14 Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	44
2.15 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)	45

I. PENDAHULUAN

Selama hampir dua dekade era reformasi, sistem otonomi daerah telah berjalan di Indonesia. Sistem ini memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri. Meskipun sudah berjalan cukup lama, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah secara optimal. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk pembangunan daerah diberbagai bidang.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, pemerintah telah mengaturnya dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Pemerintah daerah diharuskan menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan untuk mendukung kegiatan pembangunan baik berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun realisasi.

Penyusunan publikasi terkait laporan keuangan daerah menjadi salah satu kegiatan Badan Pusat Statistik dalam rangka menyediakan informasi terkait laporan keuangan daerah. Publikasi ini merupakan output dari pendataan Survei Statistik Keuangan Daerah (K2) yang ada di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, publikasi ini memuat data tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Statistik keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota semakin diperlukan terutama untuk:

1. Bahan perhitungan PDRB neraca ekonomi baik tingkat daerah maupun PDB pada tingkat nasional, tabel input-output, dan neaca arus dana.
2. Memberikan gambaran mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Mengetahui potensi dan peranan sumber dana masing-masing daerah.
4. Informasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

II. SUMBER DATA

Data dalam publikasi ini diperoleh melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- 1) Realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten/Kota menurut sumber penerimaan selama tahun anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah 2019.

- 2) Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dirinci menurut jenis pengeluaran selama tahun anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota. Konsep dan definisi tersebut sudah baku sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. Berikut ini beberapa penjelasan dan definisi dalam daftar isian K2.

Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua

kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan c, parkir, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTPB), Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumberdaya alam berasal dari pendapatan luran Hak Pengusaha Hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh

daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Bunga

Adalah pembayaran bunga utang, pembayarannya yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membiayai produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolahannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan Keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan Keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penertiban obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

IV. ULASAN SINGKAT

Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayahnya terbagi menjadi 34 provinsi, dimana setiap provinsi dibagi atas beberapa daerah kabupaten/kota. Setiap wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembagian wilayah secara administratif ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada didaerahnya secara luas sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Pembagian wilayah secara administratif menunjukkan besarnya peran pemerintah daerah dalam ikut serta membangun Indonesia yang mampu bersaing secara global. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat merencanakan sekaligus mengatur daerahnya secara mandiri. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengelola anggaran secara optimal agar pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat tercapai. Hal ini tentunya akan ikut menyumbang pembangunan secara nasional.

Tabel A.
**Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2016-
2019**

Tahun (1)	Realisasi (000 Rp) (2)	Perubahan (%) (3)
2016	34.177.482.130	14,16
2017	33.151.099.450	(3,003)
2018	33.686.416.961	1,615
2019*	35.525.303.935	5,459

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Selain itu, lokasinya yang strategis di tengah kepulauan menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia. Sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adanya otonomi daerah tentunya membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang ada. Hal ini akan berdampak pada pembangunan yang lebih cepat dan terarah.

Pengelolaan anggaran yang optimal menjadi penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pembangunan. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

4.1. Penerimaan/Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pos pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan menuju terwujudnya otonomisasi daerah yang lebih nyata.

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2017-2019

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pendapatan Daerah	31.257.264.055	32.163.559.909	34.569.374.105
1. Pendapatan Asli Daerah	4.553.701.395	4.208.071.761	5.052.291.225
2. Dana Perimbangan	22.452.266.674	22.853.383.765	23.692.885.041
3. Lain-lain pendapatan yang sah	4.251.295.986	5.102.104.383	5.824.197.839
B. Pembiayaan Daerah	1.893.835.395	1.522.857.052	955.929.830
Total Penerimaan Daerah	33.151.099.450	33.686.416.961	35.525.303.935

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Total penerimaan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun anggaran 2016 - 2019 secara riil mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penerimaan daerah menurun sekitar 3 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2017, turun dari 34.177.482.130 ribu rupiah di 2016 menjadi 33.151.099.450 ribu rupiah (Lihat Tabel A). Kemudian mengalami peningkatan secara riil mulai tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun anggaran 2019 penerimaan daerah sebesar 35.525.303.935 ribu rupiah naik lebih dari 5 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya.

4.1. 1. Pendapatan Asli Daerah

Besarnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menggali potensi yang dimiliki. Jumlah dan peningkatan penerimaan dari PAD tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara lebih mandiri.

Tabel C. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2017-2019

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pajak Daerah	1.737.803.691	1.808.123.430	2.213.156.068
2. Retribusi Daerah	368.081.154	389.575.553	560.720.042
3. Laba Usaha Daerah	253.741.851	238.563.095	263.900.099
4. Lainnya	2.194.074.699	1.771.809.683	2.014.515.016
Pendapatan Asli Daerah	4.553.701.395	4.208.071.761	5.052.291.225

*Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Berdasarkan Tabel C, PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2019 sebesar 5.052.291.225 ribu rupiah. Dari total pendapatan tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang pendapatan yang utama. Pada tahun anggaran 2019, pajak daerah mencapai 2.213.156.068 ribu rupiah (43,80 persen dari total PAD) dan retribusi daerah sebesar 560.720.042 ribu rupiah (11,10 persen dari total PAD).

4.1.2. Bagian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemberian Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi. Dana perimbangan menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari total penerimaan daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan selama tahun 2017 hingga 2019. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel B. Pada tahun anggaran 2019, terjadi peningkatan dana perimbangan dari 22.853.383.765 ribu rupiah di tahun 2018 menjadi 23.692.885.041 ribu rupiah atau naik sebesar 3,67 persen. Kontribusinya terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 67,84 persen dan 66,69 persen.

**Tabel D. Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menurut Jenis Penerimaan
Tahun Anggaran 2017-2019**

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bagi Hasil Pajak	561.251.688	433.541.969	451.950.820
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	141.994.482	197.676.553	326.155.853
3. Dana Alokasi Umum	15.709.854.957	15.855.385.823	16.718.676.960
4. Dana Alokasi Khusus	6.039.165.547	6.366.779.420	6.196.101.408
Jumlah	22.452.266.674	22.853.383.765	23.692.885.041

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2019, bagi hasil bukan pajak menunjukkan kenaikan terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari pos lain. Bagi hasil bukan pajak pada tahun anggaran 2019 sebesar 326.155.853 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 64,99 persen. Namun, dilihat dari total penerimaan pemerintah daerah bagian dana perimbangan, dana alokasi umum memiliki kontribusi yang paling besar, yaitu 70,56 persen atau sebesar 16.718.676.960 ribu rupiah.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Tabel B, penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2019, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 5.824.197.839 ribu rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 14,15 persen dibandingkan keadaan tahun 2018. Pada tahun 2018, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 5.102.104.383 ribu rupiah. Apabila dilihat dari total penerimaan daerah, pada tahun anggaran 2019 lain-lain pendapatan yang sah menyumbang sebesar 16,39 persen dari total penerimaan.

4.2. Pengeluaran Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung. Namun, pada format lama terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diantaranya adalah pengeluaran untuk sektor industri, transportasi, tenaga kerja, dsb.

**Tabel E. Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019**

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Tidak Langsung	14.812.824.014	16.241.291.388	17.583.264.276
2. Belanja Langsung	16.730.837.003	16.096.383.266	17.692.012.977
3. Pembiayaan Daerah	1.607.438.433	1.348.742.307	250.026.682
Jumlah	33.151.099.450	33.686.416.961	35.525.303.935

*Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Pada tahun anggaran 2019, total pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan adalah sebesar 35.525.303.935 ribu rupiah, dimana 17.583.264.276 ribu rupiah (49,50 persen) diantaranya merupakan pengeluaran/belanja tidak langsung daerah, 17.692.012.977 ribu rupiah (49,80 persen) adalah pengeluaran/belanja langsung Pemda TK II se-Sulawesi Selatan, dan 250.026.682 ribu rupiah (0,70 persen) adalah pembiayaan daerah.

<https://sulsel.bps.go.id>

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	958.708.428	1.134.461.364	1.075.798.319
02. Bulukumba	1.523.778.007	1.446.049.036	1.514.161.031
03. Bantaeng	899.235.606	934.291.711	1.102.664.417
04. Jeneponto	1.160.543.407	1.235.248.031	1.402.923.255
05. Takalar	1.112.798.948	1.183.765.746	1.185.816.050
06. Gowa	1.918.379.406	1.976.146.922	1.927.298.248
07. Sinjai	1.166.937.266	1.183.903.154	1.351.515.945
08. Maros	1.320.372.522	1.451.523.003	1.481.400.110
09. Pangkep	1.409.500.620	1.435.720.841	1.428.745.974
10. Barru	1.187.559.580	1.139.185.651	1.017.737.009
11. Bone	2.322.902.541	2.340.738.760	2.393.871.615
12. Soppeng	1.265.910.363	1.156.095.418	1.183.808.668
13. Wajo	1.482.725.465	1.442.822.755	1.610.118.926
14. Sidrap	1.312.970.006	1.203.018.378	1.284.924.874
15. Pinrang	1.369.888.859	1.425.104.735	1.278.266.287
16. Enrekang	1.006.750.835	1.021.193.268	1.096.019.242
17. Luwu	1.354.226.167	1.357.375.658	1.480.988.005
18. Tana Toraja	1.223.867.989	1.143.875.546	1.290.000.000
22. Luwu Utara	1.249.145.758	1.303.242.213	1.389.921.715
25. Luwu Timur	1.521.236.795	1.571.114.375	1.632.274.779
26. Toraja Utara	947.438.298	1.073.357.129	1.120.111.205
71. Makassar	3.451.473.588	3.700.838.038	4.314.952.984
72. Parepare	989.485.337	824.716.729	947.839.218
73. Palopo	995.263.659	1.002.628.500	1.014.146.059
Sulawesi Selatan	33.151.099.450	33.686.416.961	35.525.303.935

*catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

**Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	899.122.565	1.044.284.934	1.004.376.763
02. Bulukumba	1.431.800.027	1.426.015.624	1.501.658.770
03. Bantaeng	895.982.572	932.025.701	1.077.404.809
04. Jeneponto	1.088.513.971	1.211.362.974	1.402.923.255
05. Takalar	1.062.742.301	1.153.878.458	1.173.816.050
06. Gowa	1.790.263.500	1.784.865.573	1.821.848.248
07. Sinjai	1.076.261.747	1.136.907.610	1.123.515.945
08. Maros	1.299.787.473	1.420.729.690	1.472.440.688
09. Pangkep	1.360.182.759	1.369.995.735	1.417.245.974
10. Barru	1.015.664.818	963.311.132	976.487.009
11. Bone	2.201.699.676	2.251.443.046	2.369.014.885
12. Soppeng	1.155.718.382	1.156.095.418	1.162.500.111
13. Wajo	1.427.657.047	1.407.741.735	1.599.118.926
14. Sidrap	1.304.639.868	1.192.419.056	1.274.325.553
15. Pinrang	1.221.185.921	1.279.304.768	1.278.266.287
16. Enrekang	1.000.408.602	1.014.028.740	1.095.919.242
17. Luwu	1.292.684.011	1.323.121.887	1.463.900.947
18. Tana Toraja	1.095.027.645	1.071.079.857	1.290.000.000
22. Luwu Utara	1.211.177.536	1.282.825.003	1.369.921.715
25. Luwu Timur	1.365.172.781	1.466.152.956	1.537.819.830
26. Toraja Utara	937.068.626	1.058.775.914	1.116.611.205
71. Makassar	3.282.045.612	3.428.479.729	4.099.952.984
72. Parepare	908.335.082	823.930.414	931.658.850
73. Palopo	934.121.533	964.783.955	1.008.646.059
Sulawesi Selatan	31.257.264.055	32.163.559.909	34.569.374.105

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	77.841.130	63.310.747	73.912.605
02. Bulukumba	201.080.429	136.827.043	194.290.833
03. Bantaeng	70.699.799	94.643.715	98.818.731
04. Jeneponto	97.930.246	91.994.773	140.833.400
05. Takalar	111.719.000	125.156.458	140.821.439
06. Gowa	268.339.203	217.112.643	198.479.076
07. Sinjai	113.754.360	95.221.950	90.402.577
08. Maros	194.999.053	219.844.779	266.418.500
09. Pangkep	209.355.293	174.288.744	185.326.285
10. Barru	130.579.972	104.627.707	110.014.003
11. Bone	280.478.099	214.246.216	195.573.256
12. Soppeng	125.892.547	131.607.491	106.944.951
13. Wajo	135.662.057	134.139.080	155.454.669
14. Sidrap	145.776.573	115.904.994	140.872.160
15. Pinrang	118.859.701	131.019.240	111.413.048
16. Enrekang	99.669.276	66.043.332	109.257.213
17. Luwu	109.250.263	106.865.739	109.652.921
18. Tana Toraja	141.779.060	106.108.442	187.752.107
22. Luwu Utara	109.659.129	113.283.070	121.816.169
25. Luwu Timur	254.902.888	264.769.980	289.641.415
26. Toraja Utara	44.134.854	41.976.381	56.220.028
71. Makassar	1.202.921.487	1.185.453.006	1.649.402.916
72. Parepare	141.109.845	134.343.383	151.920.731
73. Palopo	167.307.131	139.282.848	167.052.192
Sulawesi Selatan	4.553.701.395	4.208.071.761	5.052.291.225

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	7.480.796	9.325.671	8.963.500
02. Bulukumba	29.579.399	31.038.937	45.139.501
03. Bantaeng	10.182.544	11.612.686	16.131.500
04. Jeneponto	13.231.464	13.995.691	17.074.000
05. Takalar	24.462.341	36.501.894	21.214.306
06. Gowa	89.747.691	100.361.985	86.514.635
07. Sinjai	14.326.761	15.829.106	15.358.000
08. Maros	102.810.770	117.385.116	143.658.500
09. Pangkep	72.915.174	75.013.342	78.017.440
10. Barru	22.134.247	17.964.684	16.765.000
11. Bone	44.726.076	51.236.484	43.108.724
12. Soppeng	14.730.111	17.390.063	14.635.000
13. Wajo	31.992.174	34.622.288	35.654.314
14. Sidrap	24.915.000	29.102.296	29.350.387
15. Pinrang	24.709.041	25.817.574	23.154.500
16. Enrekang	9.023.051	10.843.118	12.005.000
17. Luwu	24.973.292	23.225.730	20.527.000
18. Tana Toraja	9.211.461	9.288.336	13.000.000
22. Luwu Utara	16.660.609	19.535.299	26.026.443
25. Luwu Timur	139.811.836	135.222.909	150.823.500
26. Toraja Utara	16.208.700	18.403.533	21.034.818
71. Makassar	938.796.384	942.551.891	1.315.000.000
72. Parepare	27.856.992	30.348.994	28.325.000
73. Palopo	27.317.777	31.505.803	31.675.000
Sulawesi Selatan	1.737.803.691	1.808.123.430	2.213.156.068

catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.5. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	1.527.407	1.659.494	2.128.700
02. Bulukumba	11.418.823	10.060.670	23.201.332
03. Bantaeng	5.779.293	5.280.390	7.179.675
04. Jeneponto	49.906.531	49.962.275	86.578.500
05. Takalar	2.379.674	2.005.430	5.200.645
06. Gowa	55.937.919	74.468.417	70.783.065
07. Sinjai	6.180.735	6.095.747	6.129.161
08. Maros	17.844.885	21.050.163	22.140.000
09. Pangkep	6.686.921	7.552.825	7.688.718
10. Barru	6.258.478	7.124.359	11.771.127
11. Bone	12.734.571	19.671.023	21.943.707
12. Soppeng	8.072.513	8.056.636	8.107.436
13. Wajo	14.563.871	11.222.828	18.069.350
14. Sidrap	11.192.079	12.110.188	13.835.293
15. Pinrang	3.278.047	3.759.353	3.569.536
16. Enrekang	26.044.548	27.673.430	33.155.720
17. Luwu	7.281.450	8.262.083	8.810.000
18. Tana Toraja	8.141.327	10.418.282	17.000.000
22. Luwu Utara	9.600.876	11.240.548	12.227.428
25. Luwu Timur	6.234.835	4.867.621	6.209.683
26. Toraja Utara	9.390.297	14.106.453	20.773.300
71. Makassar	72.788.075	57.277.223	133.221.234
72. Parepare	7.992.432	7.627.237	7.236.888
73. Palopo	6.845.567	8.022.878	13.759.544
Sulawesi Selatan	368.081.154	389.575.553	560.720.042

*(catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Tabel 1.6. Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	11.164.787	9.492.702	9.352.000
02. Bulukumba	3.273.064	3.657.436	5.000.000
03. Bantaeng	5.964.251	4.790.270	5.800.000
04. Jeneponto	5.746.047	4.596.069	6.367.000
05. Takalar	10.170.260	8.674.272	10.208.844
06. Gowa	4.625.882	3.879.102	5.170.000
07. Sinjai	5.855.149	4.660.803	4.660.803
08. Maros	11.528.460	11.522.540	11.600.000
09. Pangkep	11.264.745	10.630.773	14.140.000
10. Barru	9.637.357	8.447.705	8.447.705
11. Bone	6.727.966	7.055.937	6.986.469
12. Soppeng	15.056.097	14.338.442	15.000.000
13. Wajo	15.383.403	14.144.242	15.384.000
14. Sidrap	5.746.047	4.628.436	5.738.586
15. Pinrang	11.237.521	8.997.939	11.224.012
16. Enrekang	12.355.808	13.596.908	15.100.000
17. Luwu	5.855.149	5.146.303	5.100.000
18. Tana Toraja	5.782.414	6.084.937	13.000.000
22. Luwu Utara	1.527.430	1.707.466	5.420.000
25. Luwu Timur	32.076.032	25.666.782	25.500.000
26. Toraja Utara	4.582.290	4.272.403	4.582.291
71. Makassar	45.023.066	49.463.120	46.645.052
72. Parepare	6.176.088	6.473.337	6.473.337
73. Palopo	6.982.538	6.635.171	7.000.000
Sulawesi Selatan	253.741.851	238.563.095	263.900.099

catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.7. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	57.668.140	42.832.880	53.468.405
02. Bulukumba	156.809.143	92.070.000	120.950.000
03. Bantaeng	48.773.711	72.960.369	69.707.556
04. Jeneponto	29.046.204	23.440.738	30.813.900
05. Takalar	74.706.725	77.974.862	104.197.644
06. Gowa	118.027.711	38.403.139	36.011.376
07. Sinjai	87.391.715	68.636.294	64.254.613
08. Maros	62.814.938	69.886.960	89.020.000
09. Pangkep	118.488.453	81.091.804	85.480.127
10. Barru	92.549.890	71.090.959	73.030.171
11. Bone	216.289.486	136.282.772	123.534.356
12. Soppeng	88.033.826	91.822.350	69.202.515
13. Wajo	73.722.609	74.149.722	86.347.005
14. Sidrap	103.923.447	70.064.074	91.947.894
15. Pinrang	79.635.092	92.444.374	73.465.000
16. Enrekang	52.245.869	13.929.876	48.996.493
17. Luwu	71.140.372	70.231.623	75.215.921
18. Tana Toraja	118.643.858	80.316.887	144.752.107
22. Luwu Utara	81.870.214	80.799.757	78.142.298
25. Luwu Timur	76.780.185	99.012.668	107.108.232
26. Toraja Utara	13.953.567	5.193.992	9.829.619
71. Makassar	146.313.962	136.160.772	154.536.630
72. Parepare	99.084.333	89.893.815	109.885.506
73. Palopo	126.161.249	93.118.996	114.617.648
Sulawesi Selatan	2.194.074.699	1.771.809.683	2.014.515.016

*catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

**Tabel 1.8. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	709.530.394	828.217.729	800.690.365
02. Bulukumba	1.059.812.765	1.041.482.831	1.042.307.756
03. Bantaeng	716.079.461	724.895.652	796.073.343
04. Jeneponto	870.000.481	941.044.363	1.049.790.705
05. Takalar	829.556.432	868.940.508	877.268.821
06. Gowa	1.304.093.897	1.237.082.856	1.273.809.265
07. Sinjai	864.137.112	864.678.303	882.254.710
08. Maros	903.546.699	988.704.969	985.485.153
09. Pangkep	1.010.789.988	1.032.137.488	1.028.991.061
10. Barru	804.111.869	733.938.277	725.163.820
11. Bone	1.512.633.984	1.548.309.678	1.634.785.865
12. Soppeng	927.905.873	887.177.569	918.021.488
13. Wajo	1.108.701.942	1.047.331.470	1.146.228.487
14. Sidrap	996.484.765	910.640.882	963.412.442
15. Pinrang	918.761.123	956.701.625	986.438.878
16. Enrekang	765.016.963	778.355.773	795.664.209
17. Luwu	905.261.282	922.578.717	1.054.333.937
18. Tana Toraja	820.318.984	788.857.048	840.282.899
22. Luwu Utara	912.684.113	927.741.269	930.794.773
25. Luwu Timur	731.292.365	873.706.953	853.925.825
26. Toraja Utara	711.002.965	795.904.720	784.486.737
71. Makassar	1.672.967.166	1.808.260.585	1.911.094.669
72. Parepare	690.497.321	599.611.905	660.209.347
73. Palopo	707.078.730	747.082.595	751.370.486
Sulawesi Selatan	22.452.266.674	22.853.383.765	23.692.885.041

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.9. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	10.391.107	9.920.264	9.890.289
02. Bulukumba	16.158.443	13.766.673	13.736.092
03. Bantaeng	14.214.270	10.273.181	10.298.618
04. Jeneponto	14.856.930	12.050.670	12.823.467
05. Takalar	14.377.471	11.692.508	12.650.824
06. Gowa	19.084.678	14.221.782	14.018.499
07. Sinjai	13.139.150	11.847.272	11.835.964
08. Maros	18.428.199	20.964.915	21.120.228
09. Pangkep	27.438.650	20.095.061	20.760.040
10. Barru	11.631.882	10.147.409	10.014.817
11. Bone	26.221.954	17.583.163	15.786.686
12. Soppeng	18.571.110	14.174.173	14.346.279
13. Wajo	75.330.381	29.327.923	41.639.211
14. Sidrap	15.004.381	12.434.487	12.146.287
15. Pinrang	14.529.666	11.332.802	11.181.856
16. Enrekang	13.136.162	10.596.583	10.560.315
17. Luwu	13.385.177	10.608.343	11.200.000
18. Tana Toraja	13.245.367	9.274.053	9.657.606
22. Luwu Utara	13.953.150	11.617.170	12.027.383
25. Luwu Timur	31.789.128	36.751.721	38.543.730
26. Toraja Utara	5.880.271	8.000.529	9.712.573
71. Makassar	114.981.454	102.913.565	104.237.373
72. Parepare	31.172.324	12.987.116	12.563.774
73. Palopo	14.330.383	10.960.606	11.198.909
Sulawesi Selatan	561.251.688	433.541.969	451.950.820

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.10. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	3.517.279	5.388.500	7.334.387
02. Bulukumba	17.237.070	4.077.968	7.318.451
03. Bantaeng	3.872.047	4.343.619	7.318.451
04. Jeneponto	3.774.323	4.577.855	7.319.301
05. Takalar	4.432.419	5.650.549	7.318.451
06. Gowa	3.778.734	4.552.960	7.336.216
07. Sinjai	3.600.693	4.349.076	7.318.518
08. Maros	3.564.068	4.435.816	7.323.030
09. Pangkep	3.814.291	4.778.474	7.340.959
10. Barru	3.531.063	4.363.364	7.319.168
11. Bone	5.185.286	5.718.882	8.363.586
12. Soppeng	3.585.347	4.362.980	7.309.967
13. Wajo	-	23.349.401	75.887.300
14. Sidrap	3.569.755	4.642.153	7.829.363
15. Pinrang	3.521.206	4.346.022	7.318.451
16. Enrekang	3.797.817	4.648.280	7.689.194
17. Luwu	3.846.979	5.364.734	5.891.268
18. Tana Toraja	3.623.881	4.407.103	7.369.353
22. Luwu Utara	4.068.658	4.915.566	8.025.838
25. Luwu Timur	41.781.582	70.328.648	87.706.755
26. Toraja Utara	6.745.896	5.802.627	7.325.220
71. Makassar	3.735.395	4.366.783	7.335.891
72. Parepare	3.520.727	4.342.680	7.318.451
73. Palopo	3.889.966	4.562.513	7.538.284
Sulawesi Selatan	141.994.482	197.676.553	326.155.853

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.11. Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	531.175.255	580.780.803	600.422.533
02. Bulukumba	704.064.918	705.099.263	737.200.482
03. Bantaeng	493.079.256	494.749.832	528.840.582
04. Jeneponto	623.747.607	627.644.516	674.702.522
05. Takalar	590.649.260	595.466.518	631.470.676
06. Gowa	835.733.631	837.326.483	887.926.896
07. Sinjai	585.821.629	585.911.082	611.802.671
08. Maros	691.755.951	697.947.111	738.574.547
09. Pangkep	689.947.090	752.773.975	784.495.577
10. Barru	510.227.516	510.978.699	534.609.237
11. Bone	1.069.494.543	1.070.426.493	1.116.830.949
12. Soppeng	624.804.701	624.626.898	649.192.878
13. Wajo	710.492.759	714.224.148	753.977.048
14. Sidrap	608.140.939	610.506.232	649.569.016
15. Pinrang	690.060.262	690.060.262	744.790.264
16. Enrekang	534.335.959	534.335.959	559.038.403
17. Luwu	676.991.576	680.212.384	718.676.594
18. Tana Toraja	550.123.359	551.496.571	592.384.301
22. Luwu Utara	653.395.912	655.693.773	681.415.260
25. Luwu Timur	545.609.968	545.609.968	557.933.304
26. Toraja Utara	518.518.563	519.040.535	553.781.929
71. Makassar	1.300.764.306	1.299.554.321	1.389.864.807
72. Parepare	454.752.410	454.752.410	474.983.198
73. Palopo	516.167.587	516.167.587	546.193.286
Sulawesi Selatan	15.709.854.957	15.855.385.823	16.718.676.960

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.12. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	164.446.753	232.128.162	183.043.156
02. Bulukumba	322.352.334	318.538.927	284.052.731
03. Bantaeng	204.913.888	215.529.020	249.615.692
04. Jeneponto	227.621.621	296.771.322	354.945.415
05. Takalar	220.097.282	256.130.933	225.828.870
06. Gowa	445.496.854	380.981.631	364.527.654
07. Sinjai	261.575.640	262.570.873	251.297.557
08. Maros	189.798.481	265.357.127	218.467.348
09. Pangkep	289.589.957	254.489.978	216.394.485
10. Barru	278.721.408	208.448.805	173.220.598
11. Bone	411.732.201	454.581.140	493.804.644
12. Soppeng	280.944.715	244.013.518	247.172.364
13. Wajo	322.878.802	280.429.998	274.724.928
14. Sidrap	369.769.690	283.058.010	293.867.776
15. Pinrang	210.649.989	250.962.539	223.148.307
16. Enrekang	213.747.025	228.774.951	218.376.297
17. Luwu	211.037.550	226.393.256	318.566.075
18. Tana Toraja	253.326.377	223.679.321	230.871.639
22. Luwu Utara	241.266.393	255.514.760	229.326.292
25. Luwu Timur	112.111.687	221.016.616	169.742.036
26. Toraja Utara	179.858.235	263.061.029	213.667.015
71. Makassar	253.486.011	401.425.916	409.656.598
72. Parepare	201.051.860	127.529.699	165.343.924
73. Palopo	172.690.794	215.391.889	186.440.007
Sulawesi Selatan	6.039.165.547	6.366.779.420	6.196.101.408

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.13. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	111.751.041	152.756.458	129.773.793
02. Bulukumba	170.906.833	247.705.750	265.060.181
03. Bantaeng	109.203.312	112.486.334	182.512.735
04. Jeneponto	120.583.244	178.323.838	212.299.150
05. Takalar	121.466.869	159.781.492	155.725.790
06. Gowa	217.830.400	330.670.074	349.559.907
07. Sinjai	98.370.275	177.007.357	150.858.658
08. Maros	201.241.721	212.179.942	220.537.035
09. Pangkep	140.037.478	163.569.503	202.928.628
10. Barru	80.972.977	124.745.148	141.309.186
11. Bone	408.587.593	488.887.152	538.655.764
12. Soppeng	101.919.962	137.310.358	137.533.672
13. Wajo	183.293.048	226.271.185	297.435.770
14. Sidrap	162.378.530	165.873.180	170.040.951
15. Pinrang	183.565.097	191.583.903	180.414.361
16. Enrekang	135.722.363	169.629.635	190.997.820
17. Luwu	278.172.466	293.677.431	299.914.089
18. Tana Toraja	132.929.601	176.114.367	261.964.994
22. Luwu Utara	188.834.294	241.800.664	317.310.773
25. Luwu Timur	378.977.528	327.676.023	394.252.590
26. Toraja Utara	181.930.807	220.894.813	275.904.440
71. Makassar	406.156.959	434.766.138	539.455.399
72. Parepare	76.727.916	89.975.126	119.528.772
73. Palopo	59.735.672	78.418.512	90.223.381
Sulawesi Selatan	4.251.295.986	5.102.104.383	5.824.197.839

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 1.14. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	59.585.863	90.176.430	71.421.556
02. Bulukumba	91.977.980	20.033.412	12.502.261
03. Bantaeng	3.253.034	2.266.010	25.259.608
04. Jeneponto	72.029.436	23.885.057	-
05. Takalar	50.056.647	29.887.288	12.000.000
06. Gowa	128.115.906	191.281.349	105.450.000
07. Sinjai	90.675.519	46.995.544	228.000.000
08. Maros	20.585.049	30.793.313	8.959.422
09. Pangkep	49.317.861	65.725.106	11.500.000
10. Barru	171.894.762	175.874.519	41.250.000
11. Bone	121.202.865	89.295.714	24.856.730
12. Soppeng	110.191.981	-	21.308.557
13. Wajo	55.068.418	35.081.020	11.000.000
14. Sidrap	8.330.138	10.599.322	10.599.321
15. Pinrang	148.702.938	145.799.967	-
16. Enrekang	6.342.233	7.164.528	100.000
17. Luwu	61.542.156	34.253.771	17.087.058
18. Tana Toraja	128.840.344	72.795.689	-
22. Luwu Utara	37.968.222	20.417.210	20.000.000
25. Luwu Timur	156.064.014	104.961.419	94.454.949
26. Toraja Utara	10.369.672	14.581.215	3.500.000
71. Makassar	169.427.976	272.358.309	215.000.000
72. Parepare	81.150.255	786.315	16.180.368
73. Palopo	61.142.126	37.844.545	5.500.000
Sulawesi Selatan	1.893.835.395	1.522.857.052	955.929.830

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	958.708.428	1.134.461.364	1.075.798.319
02. Bulukumba	1.523.778.007	1.446.049.036	1.514.161.031
03. Bantaeng	899.235.606	934.291.711	1.102.664.417
04. Jeneponto	1.160.543.407	1.235.248.031	1.402.923.255
05. Takalar	1.112.798.948	1.183.765.746	1.185.816.050
06. Gowa	1.918.379.406	1.976.146.922	1.927.298.248
07. Sinjai	1.166.937.266	1.183.903.154	1.351.515.945
08. Maros	1.320.372.522	1.451.523.003	1.481.400.110
09. Pangkep	1.409.500.620	1.435.720.841	1.428.745.974
10. Barru	1.187.559.580	1.139.185.651	1.017.737.009
11. Bone	2.322.902.541	2.340.738.760	2.393.871.615
12. Soppeng	1.265.910.363	1.156.095.418	1.183.808.668
13. Wajo	1.482.725.465	1.442.822.755	1.610.118.926
14. Sidrap	1.312.970.006	1.203.018.378	1.284.924.874
15. Pinrang	1.369.888.859	1.425.104.735	1.278.266.287
16. Enrekang	1.006.750.835	1.021.193.268	1.096.019.242
17. Luwu	1.354.226.167	1.357.375.658	1.480.988.005
18. Tana Toraja	1.223.867.989	1.143.875.546	1.290.000.000
22. Luwu Utara	1.249.145.758	1.303.242.213	1.389.921.715
25. Luwu Timur	1.521.236.795	1.571.114.375	1.632.274.779
26. Toraja Utara	947.438.298	1.073.357.129	1.120.111.205
71. Makassar	3.451.473.588	3.700.838.038	4.314.952.984
72. Parepare	989.485.337	824.716.729	947.839.218
73. Palopo	995.263.659	1.002.628.500	1.014.146.059
Sulawesi Selatan	33.151.099.450	33.686.416.961	35.525.303.935

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	413.113.169	468.414.818	564.599.084
02. Bulukumba	719.457.887	727.652.663	829.712.393
03. Bantaeng	385.840.966	474.637.454	529.312.979
04. Jeneponto	600.029.540	692.280.230	735.814.372
05. Takalar	558.332.422	594.033.535	636.087.953
06. Gowa	854.553.516	927.727.666	1.003.769.557
07. Sinjai	571.223.386	614.081.745	642.932.818
08. Maros	650.203.907	665.249.461	811.557.642
09. Pangkep	661.678.226	727.268.407	797.918.627
10. Barru	453.262.833	504.402.152	552.817.720
11. Bone	1.289.123.017	1.424.064.257	1.502.315.992
12. Soppeng	608.057.552	583.647.006	625.763.319
13. Wajo	721.589.892	872.719.118	865.472.795
14. Sidrap	547.660.399	571.961.321	646.451.509
15. Pinrang	593.186.299	799.115.098	819.918.818
16. Enrekang	501.794.522	571.164.402	577.473.251
17. Luwu	731.112.093	777.190.410	819.688.006
18. Tana Toraja	533.295.948	553.827.558	621.846.941
22. Luwu Utara	630.262.806	672.499.775	723.977.174
25. Luwu Timur	584.857.285	617.514.869	694.191.433
26. Toraja Utara	471.984.728	507.251.569	559.817.630
71. Makassar	1.061.430.494	1.125.877.415	1.223.932.720
72. Parepare	318.777.801	351.776.803	366.181.279
73. Palopo	351.995.326	416.933.656	431.710.264
Sulawesi Selatan	14.812.824.014	16.241.291.388	17.583.264.276

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.3. Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	279.578.970	322.253.152	387.546.769
02. Bulukumba	534.284.832	538.858.039	621.515.780
03. Bantaeng	299.937.122	335.566.461	392.789.123
04. Jeneponto	450.925.036	498.994.368	539.827.283
05. Takalar	446.306.855	433.783.533	475.056.936
06. Gowa	656.658.328	703.167.264	746.858.367
07. Sinjai	395.945.630	433.265.411	473.819.367
08. Maros	520.313.857	526.210.828	632.561.441
09. Pangkep	495.464.658	537.022.617	622.259.653
10. Barru	350.912.266	382.944.067	420.310.497
11. Bone	829.489.458	848.688.775	1.017.075.897
12. Soppeng	441.435.975	440.053.737	490.625.427
13. Wajo	539.156.096	588.451.824	635.594.128
14. Sidrap	445.959.389	444.341.721	485.590.787
15. Pinrang	496.392.899	550.892.032	602.688.579
16. Enrekang	349.685.615	368.011.684	382.848.668
17. Luwu	472.020.209	489.997.519	533.999.193
18. Tana Toraja	370.787.054	381.568.880	415.120.855
22. Luwu Utara	409.895.233	439.887.690	447.946.977
25. Luwu Timur	373.587.186	397.203.737	438.993.843
26. Toraja Utara	318.756.427	329.402.002	351.328.950
71. Makassar	992.802.178	984.940.957	1.140.415.710
72. Parepare	300.847.280	301.146.418	343.375.375
73. Palopo	332.788.312	376.082.990	414.465.257
Sulawesi Selatan	11.103.930.865	11.652.735.706	13.012.614.862

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.4. Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	-	-	-
02. Bulukumba	6.047.234	4.286.243	2.360.000
03. Bantaeng	16.615	-	-
04. Jeneponto	-	-	-
05. Takalar	-	-	-
06. Gowa	-	-	-
07. Sinjai	-	-	16.000.000
08. Maros	-	-	-
09. Pangkep	-	-	-
10. Barru	3.265.149	3.031.557	5.191.298
11. Bone	590.231	253.351	-
12. Soppeng	-	-	-
13. Wajo	16.440	-	-
14. Sidrap	1.664.276	1.409.033	1.554.000
15. Pinrang	-	-	-
16. Enrekang	-	-	-
17. Luwu	-	-	-
18. Tana Toraja	11.244	-	-
22. Luwu Utara	-	-	-
25. Luwu Timur	-	-	-
26. Toraja Utara	-	-	-
71. Makassar	254.324	-	-
72. Parepare	2.174.522	1.994.899	2.500.000
73. Palopo	2.755.169	2.346.991	3.357.876
Sulawesi Selatan	16.795.204	13.322.074	30.963.174

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.5. Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	681.336	3.902.121	5.000.000
02. Bulukumba	-	-	-
03. Bantaeng	-	-	-
04. Jeneponto	-	-	-
05. Takalar	-	-	-
06. Gowa	-	-	-
07. Sinjai	-	-	-
08. Maros	-	-	-
09. Pangkep	-	-	-
10. Barru	2.918.016	-	-
11. Bone	-	-	-
12. Soppeng	3.790.368	1.315.800	4.608.000
13. Wajo	-	-	-
14. Sidrap	1.966.848	983.424	-
15. Pinrang	-	-	-
16. Enrekang	-	-	-
17. Luwu	-	-	-
18. Tana Toraja	3.124.000	-	-
22. Luwu Utara	100.000	100.000	100.000
25. Luwu Timur	-	-	1.608.656
26. Toraja Utara	-	-	-
71. Makassar	-	-	-
72. Parepare	1.287.072	2.234.500	1.000.000
73. Palopo	-	-	-
Sulawesi Selatan	13.867.640	8.535.845	12.316.656

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.6. Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	6.685.000	6.032.400	19.475.240
02. Bulukumba	10.968.498	13.185.600	10.874.400
03. Bantaeng	18.476.651	46.599.002	30.956.915
04. Jeneponto	13.151.831	34.158.846	9.279.882
05. Takalar	13.932.999	23.747.307	8.215.760
06. Gowa	8.928.751	10.909.183	13.902.906
07. Sinjai	49.494.866	57.927.199	13.929.600
08. Maros	7.161.000	9.571.560	10.385.400
09. Pangkep	35.730.397	44.352.842	14.156.000
10. Barru	5.742.000	22.176.252	14.265.000
11. Bone	33.183.996	97.608.506	25.337.400
12. Soppeng	51.975.878	30.714.723	6.054.800
13. Wajo	27.022.312	46.424.275	14.218.600
14. Sidrap	11.835.600	31.389.147	7.272.111
15. Pinrang	15.773.973	110.207.068	67.009.600
16. Enrekang	31.716.827	47.529.041	13.587.800
17. Luwu	21.977.265	45.452.078	8.486.300
18. Tana Toraja	9.553.350	9.701.300	16.175.350
22. Luwu Utara	13.015.147	13.569.616	21.506.000
25. Luwu Timur	14.670.150	17.141.000	24.639.000
26. Toraja Utara	6.331.747	9.804.240	10.356.970
71. Makassar	59.726.128	137.256.266	58.958.500
72. Parepare	13.106.200	45.389.214	14.500.000
73. Palopo	15.412.840	33.992.045	10.546.700
Sulawesi Selatan	495.573.406	944.838.710	444.090.234

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.7. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	4.051.400	3.477.600	5.040.000
02. Bulukumba	284.000	191.884	4.325.000
03. Bantaeng	300.000	580.000	500.000
04. Jeneponto	140.000	7.520.000	3.600.000
05. Takalar	-	-	-
06. Gowa	482.500	76.572	432.550
07. Sinjai	4.977.820	-	-
08. Maros	6.570.000	2.040.000	2.622.609
09. Pangkep	1.874.750	3.755.700	6.307.200
10. Barru	-	-	-
11. Bone	50.051.860	71.649.136	1.420.000
12. Soppeng	-	-	-
13. Wajo	39.725	6.034.000	3.475.000
14. Sidrap	-	-	-
15. Pinrang	140.950	138.700	3.025.000
16. Enrekang	206.500	120.000	250.000
17. Luwu	371.750	382.700	1.220.000
18. Tana Toraja	22.500	18.000	130.000
22. Luwu Utara	3.592.300	5.305.013	3.161.000
25. Luwu Timur	14.407.460	14.405.460	17.492.409
26. Toraja Utara	-	-	-
71. Makassar	-	465.000	-
72. Parepare	-	-	2.000.000
73. Palopo	248.500	3.671.200	500.000
Sulawesi Selatan	87.762.015	119.830.965	55.500.768

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.8. Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	1.712.125	948.300	1.300.000
02. Bulukumba	3.199.134	1.582.675	6.030.038
03. Bantaeng	-	658.214	2.916.242
04. Jeneponto	65.000	-	4.484.070
05. Takalar	-	-	-
06. Gowa	1.675.444	1.675.444	1.675.443
07. Sinjai	1.709.170	1.932.781	2.148.716
08. Maros	-	-	-
09. Pangkep	-	-	-
10. Barru	-	-	-
11. Bone	-	4.693.925	5.987.205
12. Soppeng	1.916.133	2.472.902	2.283.755
13. Wajo	-	4.265.467	5.597.857
14. Sidrap	2.898.624	8.566	745.882
15. Pinrang	-	-	-
16. Enrekang	-	-	-
17. Luwu	2.586.253	2.881.319	2.935.700
18. Tana Toraja	683.486	264.588	500.000
22. Luwu Utara	1.722.938	2.357.284	3.325.386
25. Luwu Timur	9.349.409	14.604.670	14.628.213
26. Toraja Utara	2.233.259	4.401.490	4.500.000
71. Makassar	-	-	-
72. Parepare	-	-	-
73. Palopo	-	-	-
Sulawesi Selatan	29.750.975	42.747.625	59.058.507

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.9. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	120.404.338	130.801.245	144.487.075
02. Bulukumba	164.564.859	169.414.306	184.107.175
03. Bantaeng	66.871.560	91.057.493	101.150.699
04. Jeneponto	135.747.673	151.507.016	178.137.157
05. Takalar	98.092.568	136.252.695	148.552.028
06. Gowa	186.808.493	211.899.203	240.400.291
07. Sinjai	117.850.469	120.532.614	134.035.135
08. Maros	115.956.050	126.718.623	163.988.192
09. Pangkep	128.608.421	141.173.632	151.840.009
10. Barru	90.275.979	96.250.276	106.050.925
11. Bone	375.794.960	401.160.340	450.995.490
12. Soppeng	108.918.536	109.085.807	119.652.176
13. Wajo	153.680.733	225.619.284	204.528.251
14. Sidrap	81.574.531	92.196.870	146.288.729
15. Pinrang	80.689.227	137.578.498	145.695.639
16. Enrekang	120.115.530	155.273.277	180.036.783
17. Luwu	233.989.947	238.416.525	270.046.813
18. Tana Toraja	149.064.314	160.971.853	186.543
22. Luwu Utara	200.979.935	211.109.948	246.937.811
25. Luwu Timur	172.843.080	173.477.591	195.329.312
26. Toraja Utara	144.663.295	163.643.837	191.631.710
71. Makassar	1.091.333	3.094.538	1.094.538
72. Parepare	805.904	805.904	805.904
73. Palopo	772.703	840.430	840.431
Sulawesi Selatan	3.050.164.438	3.448.881.805	3.706.818.816

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.10. Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	-	1.000.000	1.750.000
02. Bulukumba	109.330	133.916	500.000
03. Bantaeng	239.018	176.284	1.000.000
04. Jeneponto	-	100.000	485.980
05. Takalar	-	250.000	4.263.229
06. Gowa	-	-	500.000
07. Sinjai	1.245.431	423.740	3.000.000
08. Maros	203.000	708.450	2.000.000
09. Pangkep	-	963.616	3.355.765
10. Barru	149.423	-	7.000.000
11. Bone	12.512	10.224	1.500.000
12. Soppeng	20.662	4.037	2.539.161
13. Wajo	1.674.586	1.924.268	2.058.959
14. Sidrap	1.761.131	1.632.560	5.000.000
15. Pinrang	189.250	298.800	1.500.000
16. Enrekang	70.050	230.400	750.000
17. Luwu	166.669	60.269	3.000.000
18. Tana Toraja	50.000	1.302.937	189.734.193
22. Luwu Utara	957.253	170.224	1.000.000
25. Luwu Timur	-	682.411	1.500.000
26. Toraja Utara	-	-	2.000.000
71. Makassar	7.556.531	120.654	23.463.972
72. Parepare	556.823	205.868	2.000.000
73. Palopo	17.802	-	2.000.000
Sulawesi Selatan	14.979.471	10.398.658	27.463.972

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.11. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	452.586.762	555.718.143	508.699.235
02. Bulukumba	770.894.843	674.622.211	662.198.638
03. Bantaeng	508.949.817	453.982.099	568.451.438
04. Jeneponto	536.670.537	494.010.925	667.108.883
05. Takalar	520.892.666	518.260.751	544.728.097
06. Gowa	873.409.011	903.382.512	870.028.691
07. Sinjai	546.613.856	517.469.148	705.583.127
08. Maros	624.945.511	715.018.274	660.780.192
09. Pangkep	677.103.432	666.076.342	628.827.347
10. Barru	553.396.597	488.253.934	458.866.258
11. Bone	951.238.346	815.641.271	881.555.623
12. Soppeng	539.072.732	568.751.411	542.395.349
13. Wajo	719.179.588	555.867.448	740.646.131
14. Sidrap	748.406.223	613.631.622	633.219.365
15. Pinrang	668.911.927	552.024.945	458.347.469
16. Enrekang	485.805.578	435.321.222	510.145.991
17. Luwu	538.256.951	556.668.117	657.299.999
18. Tana Toraja	614.073.707	568.627.821	663.153.059
22. Luwu Utara	595.392.479	615.473.679	657.944.541
25. Luwu Timur	831.416.765	902.594.568	921.083.346
26. Toraja Utara	458.435.738	520.340.720	558.793.575
71. Makassar	2.252.243.130	2.400.203.587	3.039.020.264
72. Parepare	651.081.021	438.453.541	573.641.939
73. Palopo	611.859.786	565.988.975	579.494.420
Sulawesi Selatan	16.730.837.003	16.096.383.266	17.692.012.977

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.12. Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	65.740.006	38.831.598	47.575.828
02. Bulukumba	62.418.229	58.668.619	39.895.339
03. Bantaeng	43.997.912	28.489.503	30.581.311
04. Jeneponto	7.037.296	8.249.481	7.027.110
05. Takalar	73.280.708	80.209.755	89.808.198
06. Gowa	41.552.451	33.505.309	34.435.293
07. Sinjai	31.336.957	3.622.566	4.548.464
08. Maros	17.946.654	28.294.963	14.350.320
09. Pangkep	44.537.808	12.014.019	16.979.613
10. Barru	33.743.162	31.436.144	45.676.425
11. Bone	33.220.311	158.067.906	17.338.211
12. Soppeng	17.679.116	15.829.659	20.413.278
13. Wajo	48.628.164	40.997.760	52.898.086
14. Sidrap	45.593.117	44.745.347	44.245.530
15. Pinrang	75.997.784	23.393.904	27.177.089
16. Enrekang	19.915.359	30.099.600	35.432.781
17. Luwu	19.390.786	10.344.141	9.788.172
18. Tana Toraja	35.899.272	60.090.414	82.974.003
22. Luwu Utara	22.266.904	6.376.366	653.550
25. Luwu Timur	5.615.567	3.844.253	1.872.684
26. Toraja Utara	11.843.267	15.724.942	9.782.000
71. Makassar	460.762.613	223.251.786	235.768.007
72. Parepare	19.189.725	24.356.538	26.442.264
73. Palopo	84.506.111	54.081.161	55.927.290
Sulawesi Selatan	1.322.099.279	1.034.525.734	951.590.846

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 2.13. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	213.838.786	254.550.649	276.477.513
02. Bulukumba	364.147.137	310.623.466	356.706.443
03. Bantaeng	235.404.804	218.429.719	272.463.199
04. Jeneponto	325.156.895	300.112.388	390.121.554
05. Takalar	226.728.646	260.237.790	262.374.071
06. Gowa	353.962.254	416.199.155	409.414.380
07. Sinjai	236.144.977	269.440.403	330.310.600
08. Maros	247.826.482	274.910.617	285.913.117
09. Pangkep	279.684.178	331.324.167	386.676.755
10. Barru	174.386.411	196.090.962	212.805.808
11. Bone	525.314.562	390.050.003	572.603.128
12. Soppeng	222.259.997	282.657.252	291.185.450
13. Wajo	310.014.428	301.499.289	344.461.294
14. Sidrap	268.177.245	251.450.746	323.880.534
15. Pinrang	335.417.361	303.557.131	308.568.737
16. Enrekang	265.801.742	245.110.183	292.909.194
17. Luwu	296.408.160	346.509.575	349.170.838
18. Tana Toraja	258.091.700	258.938.300	332.716.395
22. Luwu Utara	289.904.518	348.949.784	378.094.614
25. Luwu Timur	431.604.316	474.307.446	519.480.750
26. Toraja Utara	235.021.982	288.372.449	302.720.853
71. Makassar	1.166.454.539	1.430.119.739	1.679.299.947
72. Parepare	323.647.634	284.918.674	338.473.635
73. Palopo	238.787.162	273.116.301	302.956.035
Sulawesi Selatan	7.824.185.916	8.311.476.188	9.519.784.844

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.14. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	173.007.970	262.335.896	184.645.894
02. Bulukumba	344.329.477	305.330.126	265.596.856
03. Bantaeng	229.547.101	207.062.877	265.406.928
04. Jeneponto	204.476.346	185.649.056	269.960.219
05. Takalar	220.883.312	177.813.206	192.545.828
06. Gowa	477.894.306	453.678.048	426.179.018
07. Sinjai	279.131.922	244.406.179	370.724.063
08. Maros	359.172.375	411.812.694	360.516.755
09. Pangkep	352.881.446	322.738.156	225.170.979
10. Barru	345.267.024	260.726.828	200.384.025
11. Bone	392.703.473	267.523.362	291.614.284
12. Soppeng	299.133.619	270.264.500	230.796.621
13. Wajo	360.536.996	213.370.399	343.286.751
14. Sidrap	434.635.861	317.435.529	265.093.301
15. Pinrang	257.496.782	225.073.910	122.601.643
16. Enrekang	200.088.477	160.111.439	181.804.016
17. Luwu	222.458.005	199.814.401	298.340.989
18. Tana Toraja	320.082.735	249.599.107	247.462.661
22. Luwu Utara	283.221.057	260.147.529	279.196.377
25. Luwu Timur	394.196.882	424.442.869	399.729.912
26. Toraja Utara	211.570.489	216.243.329	246.290.722
71. Makassar	625.025.978	746.832.062	1.123.952.310
72. Parepare	308.243.662	129.178.329	208.726.040
73. Palopo	288.566.513	238.791.513	220.611.095
Sulawesi Selatan	7.584.551.808	6.750.381.344	7.220.637.287

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 2.15. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2017-2019 (000 Rp)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Selayar	93.008.497	110.328.403	2.500.000
02. Bulukumba	33.425.277	43.774.162	22.250.000
03. Bantaeng	4.444.823	5.672.158	4.900.000
04. Jeneponto	23.843.330	48.956.876	-
05. Takalar	33.573.860	71.471.460	5.000.000
06. Gowa	190.416.879	145.036.744	53.500.000
07. Sinjai	49.100.024	52.352.261	3.000.000
08. Maros	45.223.104	71.255.268	9.062.276
09. Pangkep	70.718.962	42.376.092	2.000.000
10. Barru	180.900.150	146.529.565	6.053.031
11. Bone	82.541.178	101.033.232	10.000.000
12. Soppeng	118.780.079	3.697.001	15.650.000
13. Wajo	41.955.985	14.236.189	4.000.000
14. Sidrap	16.903.384	17.425.435	5.254.000
15. Pinrang	107.790.633	73.964.692	-
16. Enrekang	19.150.735	14.707.644	8.400.000
17. Luwu	84.857.123	23.517.131	4.000.000
18. Tana Toraja	76.498.334	21.420.167	5.000.000
22. Luwu Utara	23.490.473	15.268.759	8.000.000
25. Luwu Timur	104.962.745	51.004.938	17.000.000
26. Toraja Utara	17.017.832	45.764.840	1.500.000
71. Makassar	137.799.964	174.757.036	52.000.000
72. Parepare	19.626.515	34.486.385	8.016.000
73. Palopo	31.408.547	19.705.869	2.941.375
Sulawesi Selatan	1.607.438.433	1.348.742.307	250.026.682

Catatan *). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BPS-Statistics of Sulawesi Selatan Province
Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225
Email : pst7300@bps.go.id, Website : <http://sulsel.bps.go.id>

ISBN 978-623-7581-52-9

9 78623 581529